

**ANALISIS PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PADA
PENYUSUTAN AKTIVA TETAP PEMERINTAH
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

GITA VERANICA
NPM: 1405170497

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 23 Maret 2018, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : GITA VERANICA
NPM : 1405170497
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PADA
PENYUSUTAN AKTIVA TETAP PEMERINTAH KOTA
MEDAN

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(DR. EKA NURMALA SARI, SE, M.Si)

Penguji II

(RIVA UBAR HARAHAP, SE, M.Si)

Pembimbing

(NOVIEN RIALDY, SE, M.M)

Panitia Ujian

Ketua



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : GITA VERANICA
N.P.M : 1405170497
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PADA
PENYUSUTAN AKTIVA TETAP PEMERINTAH KOTA
MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(NOVIEN RIALDY, SE, MM)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : GITA VERANICA
N.P.M : 1405170497
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PADA
PENYUSUTAN AKTIVA TETAP PEMERINTAH KOTA
MEDAN

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
20/10/18	Daftar pustaka		
22/10/18	BAB IV Pembahasan dipaparkan makan dengan kata-kata pendahuluan dari pembicaraan		
	Bab V Kesimpulan dan Saran		
21/10/18	Daftar tabel		
22/10/18	Daftar pustaka		
	Ringkasan dan Saran		
28/10/18	Kesimpulan		
28/10/18	Daftar pustaka dibantu dan Saran dan Saran		
28/10/18	Daftar pustaka		
	Hubungan Pembahasan dan Saran Kesimpulan dan Saran		
24/10/18	ACC Sidang 8 Skripsi		

Pembimbing Skripsi

NOVIEN RIALDY, SE, M.M

Medan, Februari 2018
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

**SURAT PERNYATAAN
PENELITIAN/SKRIPSI**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Gita Veranica
NPM : 1405170497
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
 - Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
 - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "penetapan proyek proposal/makalah/skripsi dan penghunjakkan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, 14 Maret 2018
Pembuat Pernyataan



Gita Veranica

NB :

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat pengajuan judul
- Foto copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi

ABSTRAK

Gita Veranica. NPM. 1405170497. Analisis Penerapan Kebijakan Akuntansi Pada Penyusutan Aktiva Tetap Pemerintah Kota Medan. 2018. Skripsi.

Penyusutan Aktiva tetap merupakan salah satu komponen yang sangat penting bagi pemerintah untuk kegiatan operasionalnya. Aktiva tetap tersebut merupakan salah satu komponen dalam neraca, sehingga ketelitian dalam pengolahan aktiva tetap sangat berpengaruh pada kewajaran penilaiannya dalam laporan keuangan. Permasalahan utama dalam akuntansi adalah pencatatan, penilaian, perhitungan penyusutan serta penyajian dalam laporan keuangan. Hal ini yang mendorong peneliti untuk meneliti apakah penerapan kebijakan akuntansi penyusutan aktiva tetap pada Pemerintah Kota Medan telah sesuai dengan PMK No.1/PMK 06/2013 dengan menggunakan metode garis lurus dalam perhitungan penyusutan aktiva tetap. Dimana bertambahnya barang yang disusutkan oleh pemerintah setiap tahunnya yaitu sebesar Rp. 2.870.225.136,- pada lima tahun terakhir dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif. Data yang diperoleh peneliti adalah data tahun 2012 sampai dengan 2016. Jenis data yang dikumpulkan peneliti adalah data primer dan sekunder. Data yang diperoleh, dikumpulkan, serta dianalisis kemudian diuraikan secara rinci untuk mengetahui perhitungan penyusutan aktiva tetap dan mencari penjelasan. Pemerintah Kota Medan bergerak pada instansi pemerintahan yang melayani masyarakat dalam bentuk pelayanan pendidikan, perbaikan infrastruktur, pelayanan kesehatan, KTP/KK/Akte kelahiran dan surat perizinan usaha. Hasil penelitian penulis melihat bahwa pemerintah belum sepenuhnya menerapkan PMK No.1/PMK 06/2013, dengan baik meliputi pencatatan penyusutan aktiva tetap, penilaian metode perhitungan penyusutan aktiva tetap, dan penyajian penyusutan aktiva tetap dalam laporan keuangan yang sesuai dengan PMK No.1/PMK 06/2013.

Kata kunci: Penyusutan Aktiva Tetap, PMK No.1/PMK 06/2013, Pencatatan Penyusutan Aktiva Tetap, Metode Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap, dan penyajian penyusutan aktiva tetap.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang masih memberikan nikmat kesehatan dan keselamatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Shalawat berangkaikan salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa risalah kepada umat manusia dan membawa dari alam jahiliyyah menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan sampai sekarang ini masih dapat kita rasakan bersama.

Adapun tujuan dan penulisan tugas akhir ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penyusunan terakhir ini dapat terealisasi dengan baik dengan adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Ayahanda tercinta Alm. Misno.,S.Sos dan kepada Ibunda tercinta Alm. Heni Dawati dengan penuh kasih sayang yang telah dicurahkan pada penulis, yang selalu membantu dan mendukung baik dari segi moril maupun materil dalam menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan tak lupa juga untuk kedua adik saya Dinda Larasati dan Refan Bagas Pati yang sangat penulis sayangi serta untuk keluarga tercinta dan kepada :

1. Bapak Dr. Agussani MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr.Hasrudy Tanjung,SE, M.Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Henny Zurika Lubis, SE, M.Si, selaku Pembimbing Akademik (PA) saya yang telah banyak memberi arahan dan masukan selama ini kepada saya dalam hal perkuliahan selama ini.
8. Bapak Novien Rialdy, SE, M.M, selaku Pembimbing tugas akhir ini yang sangat-sangat membantu penulis dalam pengerjaan tugas akhir ini dari awal hingga selesai.
9. Seluruh Staf Pengajar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah mendidik penulis selama melaksanakan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Pimpinan dan karyawan Pemerintah Kota Medan pada Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan yang sangat-sangat baik sekali dan sangat-sangat membantu peneliti dalam melaksanakan riset untuk pengerjaan dan penyelesaian tugas akhir ini.
11. Untuk teman-teman dan keluarga yang telah sangat-sangat membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan tugas akhir ini, maka dalam hal ini penulis sangat mengharapkan saran, kritik serta

masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan penyelesaian tugas akhir ini untuk ke depannya.

Akhirnya penulis berharap semoga pengalaman dan pengetahuan yang penulis peroleh berguna bagi penulis dan pembaca dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Maret 2018

Penulis

Gita Veranica

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II. LANDASAN TEORI	8
A. Uraian Teoritis	8
1. Pengertian Akuntansi	8
2. Aktiva.....	10
3. Aktiva Tetap	10
3.1 Pengertian Aktiva Tetap.....	10
3.2 Klasifikasi Aktiva Tetap	15
3.3 Pengakuan Aktiva Tetap	16
3.4 Pengukuran Aktiva Tetap.....	17
3.5 Penilaian Awal Aktiva Tetap.....	18
3.6 Perolehan Aktiva tetap	19

3.7 Pengeluaran Setelah Perolehan	20
3.8 Penghentian Penggunaan Aktiva Tetap	20
3.9 Tujuan dan Manfaat Aktiva Tetap	20
4. Penyusutan Aktiva Tetap	22
4.1 Definisi Penyusutan	22
4.2 Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	27
4.3 Yang Menjadi Unsur Perhitungan Penyusutan	28
4.4 Metode Penyusutan	30
B. Penelitian Terdahulu	31
C. Kerangka Konseptual.....	33
BAB III. METODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan Penelitian	35
B. Definisi Operasional Variabel.....	35
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	36
D. Jenis dan Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Hasil Penelitian	40
1. Gambaran Umum Pemerintah Kota Medan	40
2. Visi dan Misi	43
3. Struktur Organisasi.....	44
4. Analisis Data	45

B. Pembahasan	48
1. Pencatatan Penyusutan Aktiva Tetap.....	48
2. Metode Penyusutan Aktiva Tetap.....	48
3. Penyajian Penyusutan Aktiva Tetap	50
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel. 1.1 Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Pemko Medan.....	4
Tabel. 2.1 Penelitian Terdahulu	32
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	36
Tabel 3.2 Kisi-kisi Wawancara	38
Tabel 4.1 Penyusutan Aktiva Tetap Pemerintah Kota Medan.....	47

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar. 2.1 Kerangka Konseptual	34
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu pemerintahan pada dasarnya selalu berusaha untuk mencapai tujuan didirikannya pemerintahan tersebut. Untuk menunjang agar tercapainya tujuan itu, setiap pemerintahan mempunyai aktiva (harta) tertentu guna memperlancar kegiatan yang dilaksanakan pemerintahan. Aktiva adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam jangka waktu yang relatif lama. Aktiva tetap terdiri atas tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, dan instalasi, aktiva tetap lainnya, kontruksi dalam pengerjaan, akumulasi penyusutan. Selama masa pemakaian, aktiva tetap akan mengalami penurunan nilai yang disebut penyusutan atau depresiasi (*depreciation*).

Penyusutan (*depreciation*) ini merupakan beban bagi entitas. Besarnya beban penyusutan dipengaruhi oleh harga perolehan, umur ekonomis atau masa manfaat, dan nilai sisa aktiva. Seiring dengan berlalunya waktu, aktiva tetap akan mengalami penyusutan kecuali tanah. Jika aktiva tetap menghadapi berbagai permasalahan seperti permasalahan mengenai kejelasan nilai yang dapat disusutkan, masa manfaat, atau pengelompokannya, maka penyusutan pun akan terkena dampaknya. Tanpa adanya informasi nilai aktiva yang dapat disusutkan dan masa manfaatnya, maka penentuan besarnya penyusutan tidak dapat dilakukan.

Ely Suhayati dan Sri Dewi (2009:249) menyatakan bahwa bersamaan dengan berlalunya waktu, biasanya kemampuan yang diberikan aktiva tetap berwujud menurun. Pengakuan adanya penurunan aktiva tetap berwujud ini dibebankan sebagai biaya yang dikenal dengan nama *depreciation expense* atau biaya penyusutan. Pembebanan ini dilakukan tiap bulan atau ditunda sampai akhir periode akuntansi. Penyusutan merupakan penurunan nilai manfaat secara periode dari aktiva tetap.

Adanya penerapan kebijakan akuntansi aktiva tetap yang tidak tepat akan berpengaruh terhadap nilai dan jumlah aktiva tetap yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintahan tersebut. Sehingga mempengaruhi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pemerintah dalam mempertimbangkan dan mengambil keputusan maupun kebijaksanaan dimasa mendatang. Pedoman penyelenggaraan akuntansi atas aktiva tetap adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah diterima umum agar informasi yang dihasilkan dapat berguna bagi para pemakainya dan

tidak menimbulkan salah penafsiran serta dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Jadi, manfaat yang diperoleh dari laporan ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintahan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya termasuk pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan yang diperlukan. Berdasarkan hal tersebut, maka sangat penting untuk menghitung penyusutan aktiva tetap untuk mengetahui aktiva tetap yang dapat disusutkan dan masa manfaatnya, biaya perolehan aktiva tetap harus dialokasikan sepanjang umur dari aktiva tetap tersebut secara sistematis. Dikarenakan nilai aktiva tersebut berkurang akibat penggunaan dalam operasional pemerintah. Maka dari itu, pemerintah harus benar-benar dalam menentukan metode penyusutan yang akan diterapkan, karena akan berpengaruh pada besar kecilnya biaya penyusutan yang setiap tahun akan dikeluarkan oleh pemerintah.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Medan, merupakan bidang Akuntansi yang membantu Pemerintah Kota Medan dalam melaksanakan pengumpulan, penggolongan, pencatatan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan dalam mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, serta menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.

Penyusutan Aktiva Tetap dihitung melalui Daftar Perhitungan Penyusutan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Laporan perhitungan penyusutan

pada tahun 2012 hingga tahun 2016 pada Pemerintah Kota Medan, dijelaskan pada Tabel dibawah ini:

Tabel. 1.1
Nilai Perolehan Aktiva Tetap Pemerintah Kota Medan

Nama Bidang Barang	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
Alat angkutan	148.464.473,00	884.006.473,00	884.006.473,00	890.006.473,00	1.353.559.648,00
Alat Kantor	28.675.000,00	122.825.000,00	122.825.000,00	122.825.000,00	172.913.542,00
Alat Rumah Tangga	25.940.000,00	109.175.000,00	116.803.500,00	150.565.500,00	412.074.799,90
Peralatan Komputer	204.840.576,00	811.200.576,00	1.316.603.576,00	1.524.723.576,00	1.695.573.576,00
Alat Pengolahan	2.420.000,00	2.420.000,00	2.420.000,00	2.420.000,00	57.581.458,00
Meja & Kursi Kerja	280.000,00	85.580.000,00	85.580.000,00	85.580.000,00	143.156.006,10
Alat Studio	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	47.750.000,00
Alat Laboratorium	81.000.000,00	81.000.000,00	139.780.000,00	139.780.000,00	139.780.000,00
Alat Lab. Elektronika	-	-	-	1.200.000,00	1.200.000,00
Alat Lab. Lingkungan Hidup	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Gedung & Bangunan	-	22.665.500,00	22.665.500,00	22.665.500,00	22.665.500,00
TOTAL	<u>492.420.049,00</u>	<u>2.119.672.549,00</u>	<u>2.691.484.049,00</u>	<u>2.940.566.049,00</u>	<u>4.046.554.530,00</u>

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai perolehan aktiva tetap yang terjadi di Pemerintah Kota Medan. Dalam kurun waktu lima tahun, yakni dari tahun 2012 sampai 2016.

Pemerintah Kota Medan menggunakan metode garis lurus dalam perhitungan penyusutan tahunan. Dimana dalam penilaian barang terjadi kesalahan pencatatan barang sehingga nilai yang diperoleh sama, pada alat angkutan, alat kantor, alat pengolahan, meja dan kursi kerja, alat studio, alat laboratorium, alat lab. lingkungan hidup, gedung dan bangunan. Dan ada barang yang baru di beli tidak langsung dicatat dan dilaporkan sehingga mengalami kesalahan pada saat penyajian laporan penyusutan aktiva tetap, karena barang yang baru di beli tidak ikut tercatat.

Pemerintah sudah menggunakan basis pendekatan akrual (*full accrual*) yaitu PP No.71 tahun 2010. Basis akrual atau *accrual basis* pada dasarnya adalah

suatu metode akuntansi dimana biaya dan pendapatan diakui pada saat terjadinya transaksi. Sehingga informasi yang disediakan lebih andal dan terpercaya tentang seberapa besar suatu pemerintahan mengeluarkan uang atau menerima uang dalam setiap tahunnya. Hal yang penting adalah ketika transaksi terjadi langsung dicatat, karena transaksi tersebut memiliki implikasi uang masuk atau keluar di masa depan. Transaksi dicatat pada saat terjadi, walaupun uang belum benar-benar diterima atau dikeluarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual selain mencatat transaksi pengeluaran dan penerimaan kas, juga mencatat jumlah hutang dan piutang. Oleh karena itu, pencatatan menggunakan metode *accrual basis* lebih mencerminkan keadaan keuangan pemerintah yang sebenarnya. Tetapi metode *accrual basis* lebih sulit untuk diterapkan karena akuntan harus melakukan pencatatan lebih banyak.

Metode pengakuan, penilaian, penyajian penyusutan aktiva tetap Pemerintah Kota Medan sudah menerapkan SAP tetapi pelaporan penyusutan aktiva tetap belum sesuai dengan SAP. Dapat dilihat tahun 2012, 2013, dan 2014 terdapat nilai barang yang sama karena telah mengalami kesalahan dalam pencatatan barang sehingga dalam penyajian memperoleh nilai yang sama dengan tahun yang berbeda dan belum sepenuhnya menerapkan PMK Nomor.1/PMK.06/2013. Barang yang baru dibeli juga harus langsung dilaporkan, bukan hanya barang yang lama saja yang dilaporkan untuk disusutkan. Pada tahun 2015 yang terlihat dari jumlah penyusutan barang yang mengalami penurunan karena barang yang baru dibeli tidak langsung dilaporkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan melihat masalah penyusutan aktiva tetap antara tahun 2012 sampai 2016, maka penulis tertarik untuk menganalisis pelaporan serta perhitungan penyusutan yang berkenaan dengan penyusutan aktiva tetap berwujud, sehingga penulis berkeinginan melakukan suatu penelitian dengan judul:

“ANALISIS PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PADA PENYUSUTAN AKTIVA TETAP PEMERINTAH KOTA MEDAN”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Medan belum sepenuhnya menerapkan PMK No.1/PMK.06/2013 tentang penyusutan aktiva tetap.
2. Terdapat kesalahan pencatatan dan penyajian penyusutan aktiva tetap yang memperoleh nilai yang sama dengan tahun yang berbeda.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis membuat rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Apakah Penerapan Kebijakan Akuntansi Pada Penyusutan Aktiva Tetap Pemerintah Kota Medan telah sesuai dengan PMK No.1/PMK.06/2013?”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Medan dalam pencatatan dan penyajian penyusutan aktiva tetap telah sesuai dengan PMK No.1/ PMK. 06/2013.

2. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan mengenai akumulasi penyusutan khususnya aktiva tetap berwujud, menambah pengalaman bagi penulis untuk dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama pendidikan dan juga untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan program S1 Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bagi Pemerintah Kota Medan, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk menganalisa penerapan kebijakan akuntansi terhadap penyusutan aktiva tetap di Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
3. Bagi akademisi, untuk menambah pengetahuan dan keterampilan dalam hal perhitungan penyusutan aktiva tetap, perhitungan nilai aktiva sebagai penyusutan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian sejenis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pengertian Akuntansi

Akuntansi menjadi yang terdepan dan berperan penting dalam menjalankan ekonomi dan sistem sosial kita. Keputusan-keputusan yang diambil oleh individu-individu, pemerintah, badan usaha lain ditentukan dalam penggunaannya pada sumber daya yang dimiliki suatu bangsa. Tujuan utama akuntansi adalah untuk mencatat, melaporkan dan menginterpretasikan data-data ekonomi untuk digunakan sebagai pengambil keputusan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 pasal 1 ayat 2 dalam peraturan menteri Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya. Kebijakan akuntansi pemerintah pasal 4 ayat 3 sebagaimana dimaksud mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan PSAP.

Menurut *American Institute Certified Public Accountant (AICPA)* Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, dan penginterpretasian hasil proses tersebut.

Menurut *Accounting Principle Board (APB)* Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, mengenai suatu entitas ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sebagai dasar dalam memilih diantara beberapa alternative.

Menurut *Financial Accounting Standard Board (FASB)* Akuntansi adalah pengetahuan badan dan fungsinya terkait dengan sistematika pencatatan, pengklasifikasian, pengolahan, peringkasan, penganalisisan, penafsiran dan tuntutan informasi yang andal dan signifikan meliputi: transaksi, dan kejadian-kejadian yang terkait, setidaknya untuk sebagian dari karakter keuangan yang diperlukan oleh manajemen dan operasionalisasi suatu entitas (suatu unit usaha atau kesatuan akuntansi, dengan aktifitas atau kegiatan ekonomi dari unit tersebut sebagai fokusnya) dan untuk pelaporan yang harus disampaikan guna memenuhi *fiduciary* (kepercayaan) dan tanggung jawab lainnya.

Dari beberapa definisi di atas, dapat dilihat bahwa akuntansi pada dasarnya juga dirancang untuk memenuhi kebutuhan praktis. Artinya, teori akuntansi memiliki hubungan yang bersifat *defenitif* atau kepastian dengan praktik akuntansi. Kalau suatu struktur akuntansi sebagai hasil rekayasa telah diterapkan dalam lingkungan tertentu, maka secara sempit akuntansi dapat dipandang sebagai suatu proses atau kegiatan yang meliputi proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, pengklasifikasian, penguraian, penggabungan, pengiktisaran dan penyajian data keuangan dasar yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan operasi suatu unit organisasi, dengan cara-cara

tertentu, untuk menghasilkan informasi akuntansi adalah organisasi yang memiliki garis dan staf personel, yang memandang laporan akuntansi sebagai landasan yang melibatkan pendanaan, penginvestigasian, dan pengambilan keputusan operasional.

2. Aktiva

Aktiva adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

3. Aktiva Tetap

3.1. Pengertian Aktiva Tetap (*fixed assets*)

Pengertian aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Setiap perusahaan pada umumnya menggunakan aktiva tetap untuk memperlancar kegiatan usahanya. Aktiva tersebut dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual nsebagai bagian dari operasi normal. Berdasarkan sifatnya, aktiva tetap dibagi menjadi dua jenis yaitu aktiva tetap berwujud (*tangible fixed assets*) dan aktiva tetap tidak berwujud (*intangible fixed assets*).

Dalam laporan akhir ini penulis memfokuskan pembahasan pada aktiva tetap berwujud.

Aktiva tetap berwujud, digunakan dalam kegiatan normal pemerintahan, dapat digunakan secara berulang-ulang, umurnya relatif panjang lebih dari satu tahun atau siklus operasi normal pemerintahan, nilainya cukup besar atau material.

Aktiva tetap tidak berwujud, dapat dipisahkan yaitu kemampuannya untuk menjadi terpisah dan dapat dijual, dialihkan, dilisensikan, disewakan atau ditukarkan melalui suatu kontrak terkait aktiva atau kewajiban secara individual atau secara bersama. Kemudian muncul dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya, terlepas apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dari hak dan kewajiban lainnya, aktiva tidak berwujud dapat diperoleh secara eksternal melalui perolehan secara terpisah dan pertukaran aktiva atau dihasilkan secara internal. Aktiva tidak berwujud hanya dapat diakui apabila berasal dari eksternal, sedangkan biaya penelitian dan pengembangan yang terkait dengan upaya menghasilkan aktiva tidak berwujud secara internal tidak dapat diakui sebagai aktiva tidak berwujud, kecuali merupakan bagian dari perolehan aktiva lain.

Aktiva tetap merupakan komponen yang sangat penting bagi pemerintah untuk kegiatan operasionalnya. Aktiva tetap tersebut merupakan salah satu komponen dalam neraca, sehingga ketelitian dalam pengolahan aktiva tetap sangat berpengaruh terhadap kewajaran penilaiannya dalam laporan keuangan. Neraca merupakan komponen dari Laporan Keuangan yang harus disusun oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Paragraf 66, disebutkan bahwa aktiva tetap merupakan suatu bagian utama aktiva pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aktiva tetap pemerintah adalah:

- a. Aktiva tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor.
- b. Hak atas tanah tidak termasuk dalam definisi aktiva tetap, aktiva yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah seperti bahan dan perlengkapan.

Perencanaan kebutuhan aktiva tetap yang lebih optimal. Dengan informasi yang lengkap mengenai aktiva tetap beserta penurunan kapasitasnya, manajer dapat merencanakan kebutuhan aktiva tetap di masa mendatang dengan lebih baik.

Pencegahan penyajian nilai aktiva tetap yang *overstated*. Seperti telah disampaikan sebelumnya, aktiva tetap dapat mengalami penambahan nilai apabila terdapat pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja terdapat penambahan kapasitas, masa manfaat dari aktiva tetap tersebut.

Baik di sektor swasta maupun sektor pemerintahan, tidak semua aset tetap harus disusutkan. Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap yang memiliki masa manfaat terbatas.

Tanah yang umumnya diyakini memiliki masa manfaat yang tidak terbatas tidak disusutkan.

Untuk Aset tetap yang termasuk Barang Milik Negara, sesuai dengan PMK no 1/PMK.06/2013, aset tetap yang disusutkan adalah :

- a. gedung dan bangunan
- b. peralatan dan mesin
- c. Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan
- d. Aset tetap lainnya berupa aset tetap renovasi dan alat musik modern.

Aset tetap renovasi adalah renovasi atas aset tetap bukan milik suatu satuan kerja atau satuan kerja pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan kapitalisasi.

Aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya dalam neraca berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

Aset tetap yang tidak disusutkan adalah :

- a. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusannya, dan
- b. Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusannya. Berdasarkan PMK no 1/PMK.06/2013, aset tetap yang hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola untuk dilakukan penghapusannya, diperlakukan sbb.:

- a. direklasifikasi ke dalam daftar barang hilang;
- b. Tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna, Laporan Barang Pengguna, Laporan Barang Milik Negara (LBMN), serta Neraca; dan
- c. Diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 PMK 06/2013 pasal adalah dalam hal terjadi perubahan nilai aktiva tetap sebagai akibat koreksi nilai aktiva tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui dikemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan aktiva tetap tersebut.

Menurut Firdaus (2010:177), aktiva tetap adalah aktiva yang diperoleh untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan untuk jangka waktu yang lebih dari satu tahun, tidak dimaksudkan untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan, dan merupakan pengeluaran yang nilainya besar atau material.

Pengertian aktiva tetap Menurut Munawir (2010:17) adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang fisiknya Nampak dan digunakan dalam operasi yang bersifat permanen (aktiva tersebut mempunyai umur kegunaan jangka panjang atau tidak akan habis dipakai dalam satu periode kegiatan perusahaan).

Menurut Slamet Sugiri (2009:137) aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang tujuan pemilikannya adalah untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa aktiva tetap berwujud adalah aktiva tetap yang dimiliki bentuk fisik, yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional pemerintah dan bukan untuk dijual kembali dalam kegiatan operasi normal pemerintah, serta memiliki masa manfaat yang lebih dari satu tahun.

3.2. Klasifikasi Aktiva Tetap

Aktiva tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aktiva tetap yang digunakan:

- a. Tanah yang dikelompokkan sebagai aktiva tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- b. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- c. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- d. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

- e. Aktiva tetap lainnya mencakup aktiva tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aktiva tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
- f. Kontruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
- g. Aktiva tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aktiva tetap dan harus disajikan di pos aktiva lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3.3. Pengakuan Aktiva Tetap

Untuk dapat diakui sebagai aktiva tetap, suatu aktiva harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan.
- b. Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima resiko terkait. Kepastian ini biasanya tersedia jika manfaat dan resiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aktiva tidak dapat diakui.

- c. Biaya perolehan aktiva dapat diukur secara andal.
- d. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aktiva tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aktiva yang dikonstruksi/ dibangun sendiri, suatu eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
- e. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.
- f. Tujuan utama dari perolehan aktiva tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
- g. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- h. Pengakuan aktiva tetap akan sangat andal bila aktiva tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya atau pada saat penguasaannya berpindah.

3.4. Pengukuran Aktiva Tetap

Aktiva tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aktiva tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aktiva tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aktiva tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aktiva yang dikonstruksi/ dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk

perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

3.5. Penilaian Awal Aktiva Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aktiva dan dikelompokkan sebagai suatu aktiva tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aktiva tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aktiva tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aktiva tersebut diperoleh. Suatu aktiva tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aktiva juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang di miliki pemerintah. Sebagai contoh, di karenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan di gunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aktiva tetap yang diperoleh harus di nilai berdasarkan nilai wajar pada saat aktiva tetap tersebut di peroleh.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aktifa tetap yang di gunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut di susun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aktiva tetap baru , suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

3.6. Perolehan Aktiva Tetap

Suatu aktiva tetap dapat diperoleh dalam pertukaran atau pertukaran sebagian untuk suatu aktiva tetap yang tidak serupa atau aktiva lain. Biaya dari pos semacam itu diukur pada nilai wajar aktiva yang dilepaskan atau yang diperoleh, yang mana yang lebih andal, dengan nilai wajar aktiva yang dilepaskan setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer.

Suatu aktiva tetap dapat diperoleh dalam pertukaran atas suatu aktiva yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dalam bidang usaha yang sama dan memiliki suatu nilai wajar serupa. Suatu aktiva tetap juga dapat dijual dalam pertukaran dengan kepemilikan aktiva yang serupa. Dalam kedua keadaan tersebut, karena proses perolehan penghasilan tidak lengkap, tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui dalam transaksi. Sebaliknya, biaya perolehan aktiva baru adalah jumlah tercatat dari aktiva yang dilepaskan.

Aktiva tetap dicatat sebesar harga perolehannya. Dalam menentukan harga perolehan aktiva tetap, harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tetap tersebut. Pada Pemerintah Kota Medan, aktiva tetap yang dimiliki diperoleh dengan cara pembelian secara tunai. Dalam perolehan aktiva tetap secara tunai, harga perolehan aktiva tetap terdiri dari harga beli aktiva ditambah biaya yang harus dikeluarkan, sampai aktiva tetap tersebut siap untuk digunakan dalam operasional pemerintahan.

3.7. Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan suatu aktiva tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aktiva yang bersangkutan.

Pengeluaran untuk perbaikan atau perawatan aktiva tetap untuk menjaga manfaat keekonomian masa yang akan datang yang dapat diharapkan perusahaan, untuk mempertahankan standar kinerja semula atas suatu aktiva, biasanya diakui sebagai beban saat terjadi.

3.8. Penghentian Penggunaan Aktiva Tetap

Suatu aktiva tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aktiva secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Aktiva tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Aktiva tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aktiva tetap dan harus dipindahkan ke pos aktiva lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Penghentian penggunaan aktiva tetap karena *Conversion* terpaksa dapat terjadi kerusakan parah akibat terjadinya peristiwa-peristiwa seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, dan sebagainya.

3.9. Tujuan dan Manfaat Aktiva Tetap

A. Tujuan Aktiva Tetap

Tujuan dari Aktiva Tetap ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk perhitungan beban penyusutan dalam proses matching. Perhitungan tentang biaya yang akan dibebankan dalam perhitungan *net income*, lazim dikenal dengan perhitungan dari penyusutan untuk tahun yang berjalan (*current depreciation*). Perhitungan biaya penyusutan (*depreciation expense*) secara berkala, adalah tujuan utama dari pelaporan aktiva tetap.
2. Untuk memberikan interpretasi ekonomis atas aktiva tetap. Tujuan kedua dari pelaporan aktiva tetap ini dimaksudkan untuk memberikan indikasi mengenai jumlah kuantitas fisik atau kapasitas produktif yang dimiliki pemerintah.
3. Untuk menyajikan informasi yang dapat dipakai untuk menduga aliran kas di masa yang akan datang. Tujuan ketiga dari pelaporan aktiva tetap ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan pemerintah. Sebagaimana halnya dengan pengelompokan monetary assets dan current assets yang menyajikan informasi tentang kegiatan pemerintah. Demikian juga dengan aktiva tetap, pengelompokan aktiva tetap memberikan pesan-pesan tertentu tentang kegiatan pemerintah. Jumlah uang yang ditanamkan dalam aktiva tetap merupakan informasi yang relevan bagi investor dan kreditor karena dapat membantu meramalkan arus kas dikemudian hari dan memberikan indikasi tentang waktu yang tepat bagi perusahaan untuk mengganti aktiva tetap yang dimiliki.

B. Manfaat Aktiva Tetap

Beberapa manfaat dari Aktiva Tetap adalah sebagai berikut:

- 1). Aktiva tetap biasanya memiliki masa pemakaian lebih dari satu tahun, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dalam jangka waktu yang relatif lama.
- 2). Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aktiva oleh pemerintah.

4. Penyusutan Aktiva Tetap

4.1. Definisi Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aktiva tetap yang dapat di susutkan atau (*depreciable assets*) selama masa manfaat aktiva yang bersangkutan. Nilai penyusutan masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aktiva tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Penyesuaian nilai aktiva tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.

Masa manfaat aktiva tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

Penyusutan untuk setiap periode diakui sebagai beban untuk periode yang bersangkutan, kecuali termasuk sebagai jumlah tercatat aktiva lain. Bersamaan

dengan manfaat keekonomian yang diwujudkan dalam suatu aktiva dikonsumsi oleh pemerintah, jumlah tercatat aktiva berkurang untuk mencerminkan konsumsi ini, biasanya dalam bentuk beban penyusutan. Suatu beban penyusutan tetap diadakan walaupun nilai pasar aktiva melebihi jumlah tercatatnya.

Masa manfaat aktiva ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan oleh pemerintah. Kebijakan akuntansi aktiva pemerintah mempengaruhi jumlah penyusutan aktiva setelah waktu yang ditentukan atau setelah konsumsi dari proporsi tertentu atas manfaat keekonomian yang diwujudkan dalam aktiva. Karenanya, masa manfaat suatu aktiva dapat lebih pendek dari pada usia keekonomiannya. Tanah dan bangunan harus diperlakukan sebagai aktiva yang terpisah untuk tujuan akuntansi, walaupun diperoleh secara sekaligus. Tanah biasanya memiliki usia tak terbatas, oleh karena itu tidak disusutkan. Bangunan memiliki usia terbatas, oleh karena itu disusutkan. Peningkatan nilai tanah tempat bangunan didirikan tidak mempengaruhi masa manfaat bangunan.

Jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aktiva ditentukan setelah mengurangi nilai sisa aktiva. Dalam prakteknya, nilai sisa suatu aktiva sering tidak signifikan dan karenanya tidak material dalam penghitungan jumlah yang dapat disusutkan.

Sehubungan dengan penggunaan aktiva dan berjalannya waktu, dapat dipastikan bahwa aktiva tersebut mengalami pengurangan nilai dikarenakan berbagai hal. Tujuan utama dari penyusutan terhadap aktiva tetap pemerintah adalah agar dapat diketahui nilai sebenarnya dari suatu aktiva yang

menggambarkan kemungkinan manfaat ekonomi yang akan mengalir ke pemerintah.

Gedung dan Bangunan dapat diklasifikasikan menurut jenisnya, seperti gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum. Gedung bertingkat pada dasarnya terdiri dari komponen bangunan fisik, komponen penunjang utama yang berupa *mechanical engineering* (*lift*, instalasi listrik beserta *generator*, dan sarana pendingin *Air Conditioning*), dan komponen penunjang lain yang antara lain berupa saluran air dan telepon. Masing-masing komponen mempunyai masa manfaat yang berbeda, sehingga umur penyusutannya berbeda, serta memerlukan pola pemeliharaan yang berbeda pula.

Perbedaan masa manfaat dan pola pemeliharaan menyebabkan diperlukannya sub-akun pencatatan yang berbeda untuk masing-masing komponen gedung bertingkat, misalnya menjadi sebagai berikut: bangunan fisik, taman, jalan, dan tempat parkir, pagar, instalasi *Air Conditioning*, instalasi listrik dan *generator*, *lift*, penyediaan air, saluran air bersih, dan air limbah, saluran telepon.

Aktiva Tetap Peralatan dan Mesin, Aktiva Tetap Gedung dan Bangunan, Aktiva Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Ely Suhayati dan Sri Dewi (2009:249) menyatakan bahwa bersamaan dengan berlakunya waktu, biasanya kemampuan yang diberikan aktiva tetap berwujud menurun. Pengakuan adanya penurunan aktiva tetap berwujud ini

dibebankan sebagai biaya yang dikenal dengan nama *depreciation expense* (biaya penyusutan). Pembebanan ini dilakukan tiap bulan atau ditunda sampai akhir periode akuntansi. Penyusutan merupakan penurunan nilai manfaat secara periode dari aktiva tetap.

Menurut Dwi Martini (2011:173) “Penyusutan adalah metode pengalokasian biaya aktiva tetap untuk menyusutkan nilai aktiva secara sistematis selama periode manfaat dari aktiva tersebut”.

Menurut K.Fred Skousen (2009:4) menjelaskan bahwa, Penyusutan adalah alokasi yang sistematis dari harga perolehan aktiva selama periode berbeda yang memperoleh manfaat dari penggunaan suatu aktiva.

Menurut Warren, Reeve, Fess (2008:2) ada beberapa faktor yang menyebabkan penurunan kemampuan aktiva tetap untuk menyediakan manfaat bisa diidentifikasi sebagai penyusutan fisik atau penyusutan fungsional:

- 1) Penyusutan fisik (*physical depreciation*) terjadi dari kerusakan digunakan dan pengaruh cuaca.
- 2) Penyusutan fungsional (*functional depreciation*) terjadi jika aktiva tetap yang dimaksud tidak lagi mampu menyediakan manfaat dengan tingkat seperti diharapkan.

Berdasarkan pengertian yang sudah disebutkan dapat disimpulkan bahwa penyusutan adalah suatu metode pengalokasian harga perolehan aktiva setelah dikurangi nilai sisa yang dialokasikan ke periode-periode yang menerima manfaat dari aktiva tetap tersebut. Jumlah penyusutan menunjukkan bahwa penyusutan bukan merupakan suatu proses pencadangan, melainkan proses pengalokasian

harga perolehan aktiva tetap. Metode penyusutan harus mencerminkan pola pemanfaatan keekonomian aktiva oleh pemerintah.

Jika alasan dilakukan penyusutan aset tetap adalah adanya penurunan kapasitas, maka mengarahkan perumusan pengertian penyusutan sebagai penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Pengertian ini dianut oleh PMK no 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat yang mengatakan bahwa penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Demikian juga dengan PP 71 tahun 2010 lampiran II juga menganut pengertian penyusutan seperti di atas. Secara jelas paragraph 5 mengatakan bahwa “Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset”. Lampiran II PP 71 tahun 2010 merupakan prinsip akuntansi pemerintahan dengan dasar kas menuju akrual.

PMK no 1/PMK.06/2013 masih menggunakan dasar kas menuju akrual perlakuan sebagaimana dijelaskan di atas. Jika pemerintah sudah menerapkan dasar akrual sebagaimana diatur dalam Lampiran I PP 71 tahun 2010 perlakuan penyusutan akan berbeda. Jika pemerintah sudah menggunakan dasar akrual, maka pencatatan penyusutan akan dilakukan dengan mencatat Beban Penyusutan dan menambah saldo akun Akumulasi Penyusutan. Selanjutnya sesuai dengan PSAP no 7 berbasis akrual, Paragraf 54, dikatakan bahwa Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Walau bunyi paragraph standar seperti tersebut, penulis berpendapat bahwa yang diperlakukan sebagai

pengurang nilai aset tetap di neraca adalah nilai akumulasi dari penyusutan sampai dengan tanggal pelaporan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa beban penyusutan tersebut akan dilaporkan dalam laporan operasional sebagai beban operasional. Sementara itu Akumulasi penyusutan sampai akhir tahun berjalan akan dilaporkan di neraca sebagai pengurang dari nilai aset tetap, sehingga nilai yang tersaji di neraca adalah nilai bukunya.

Penyusutan Aset Tetap ini memiliki tujuan antara lain :

- a. menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah pusat;
- b. mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun kedepan;
- c. memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki.

4.2. Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap

Akumulasi penyusutan (*Accumulated Depreciation*) adalah bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aktiva tetap merupakan akun aktiva tetap yang berhubungan.

Penyusutan atas aset tetap yang diperoleh sebelum PMK 01/PMK.06/2013 akan diperlakukan sebagai koreksi penyusutan aset tetap. Koreksi ini dilaporkan pada tahun diberlakukannya penyusutan aset tetap ini. Di neraca, koreksi ini akan

dilaporkan sebagai penambah nilai akumulasi penyusutan dan pengurang nilai ekuitas dana. Penghitungan penyusutan atas aset tetap ini dilakukan dengan mengikuti peraturan menteri keuangan. PMK 01/PMK.06/2013 pasal 11 ayat 1 dalam hal terjadi perubahan nilai Aktiva tetap sebagai akibat koreksi nilai Aktiva Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap Penyusutan Aktiva Tetap tersebut. Pasal 2 penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan.

4.3. Yang menjadi unsur perhitungan penyusutan

Ada beberapa faktor yang menjadi unsur perhitungan penyusutan aktiva tetap sebagai berikut:

1. Harga perolehan adalah jumlah yang dikeluarkan untuk membeli aktiva tersebut sampai aktiva itu dapat digunakan oleh perusahaan.
2. Umur ekonomis adalah periode dimana pemerintah dapat memanfaatkan aktiva tersebut atau jumlah produksi/unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari aktiva tersebut oleh entitas. Umur ekonomis biasanya ditetapkan dalam jumlah kilometer yang ditempuh dan ukuran-ukuran yang lain.
3. Nilai residu atau biasa disebut nilai sisa yang merupakan nilai kas yang aktiva tetap tersebut pada akhir masa kegunaannya.

PMK No.1/PMK.06/2013 pasal 19 ayat 01: perhitungan dan pencatatan penyusutan aktiva tetap dilakukan pada tingkat Kuasa Pengguna Barang. Ayat 2 perhitungan dan pencatatan penyusutan aktiva tetap dilakukan oleh unit pembantu

penatausahaan, dalam hal dibentuk unit pembantu penatausahaan di lingkungan Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 21 ayat 3 dan 4 Perhitungan penyusutan aktiva tetap dilakukan sejak diperolehnya aktiva tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat aktiva tetap. Pencatatan penyusutan aktiva tetap dalam neraca dilakukan sejak diperolehnya aktiva tetap sampai dengan aktiva tetap tersebut dihapuskan.

Penyajian dan Pengungkapan pasal 22 ayat 1 yaitu penyusutan aktiva tetap setiap semester disajikan sebagai akumulasi penyusutan di Neraca periode berjalan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju AkruaI.

Pasal 23 yaitu informasi mengenai penyusutan aktiva tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. nilai penyusutan
- b. metode penyusutan yang digunakan
- c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, dan
- d. nilai tercatat dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

4.4. Metode Penyusutan

Banyak metode penyusutan yang dapat digunakan. Sebenarnya entitas pelaporan diberi beberapa pilihan metode untuk penyusutan aset tetap. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) no 7 baik yang berbasis akrual (lampiran I PP 71/2010) maupun PSAP no 7 berbasis Kas Menuju AkruaI telah mengamanatkan kepada entitas pelaporan untuk menggunakan : (a) Metode garis lurus (straight

line method); atau (b) Metode saldo menurun ganda (double declining balance method) serta (c) Metode unit produksi (unit of production method), Untuk Pemerintah Pusat, sesuai dengan PMK 01/PMK.06/2013 pasal 18 ayat 1, metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus.

Bersama dengan berlakunya waktu nilai ekonomis suatu aktiva tetap tersebut harus dapat dibebankan secara tetap dan salah satu caranya adalah dengan menentukan metode penyusutan. Terdapat beberapa metode untuk menghitung beban penyusutan, namun yang digunakan pemerintah adalah metode garis lurus (*straight line method*). Untuk itu perlu diketahui apakah metode penyusutan yang telah diterapkan oleh pemerintah telah memperhatikan perubahan nilai aktiva tetap yang menurun yang disebabkan karena berlalunya waktu atau menurunnya manfaat yang diberikan aktiva tersebut.

Aktiva tetap berwujud dapat disusutkan dalam beberapa metode, oleh karena itu pemilihan metode penyusutan yang akan dipakai terhadap suatu aktiva berwujud harus dipertimbangkan dengan baik. Metode penyusutan yang dipilih dan dianggap tepat untuk jenis aktiva tertentu, belum dapat dipastikan akan tepat untuk diterapkan pada jenis aktiva lain karena perbedaan sifat dan pola penggunaan aktiva tersebut.

Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*)

1. Tidak terdapat pengaruh keusangan.
2. Metode ini menganggap bahwa nilai aktiva tetap mengalami penurunan nilai dengan berlalunya waktu.
3. Pola biaya reparasi dan pemeliharaan relatif konstan setiap tahun.

4. Tingkat efisiensi operasi relatif konstan setiap tahun.
5. Pendapatan atau arus kas bersih yang dicapai dengan menggunakan aktiva yang baik tersebut jumlahnya konstan selama umur aktiva.

Rumus yang digunakan dalam metode ini adalah:

$$\text{Beban Penyusutan} = \frac{\text{Harga perolehan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Umur Ekonomis}}$$

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang sebelumnya juga menggunakan judul yang bersangkutan dengan Analisis Penerapan Kebijakan Akuntansi Pada Penyusutan Aktiva Tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul penelitian	Hasil penelitian
1	Idris Somad (2016)	Analisis penerapan kebijakan akuntansi aktiva tetap pada koperasi prima polipera	Beban penyusutan menggunakan metode garis lurus, metode dan prinsip yang dilakukan koperasi telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Aktiva tetap yang dimiliki oleh Koperasi Prima Polipera periode 31 Desember 2014, diketahui bahwa aktiva tetap pada Koperasi Prima Polipera, yaitu mesin foto copy dan stapler penjilid. Untuk aktiva tetap yang sudah tidak terpakai lagi diperlukan dengan cara ditukarkan dengan aktiva tetap yang lainnya
2	Wiwin Krisnawati (2013)	Tinjauan atas perolehan dan penyusutan aktiva tetap pada pt.jamsostek	Metode penyusutan yang digunakan oleh PT. Jamsostek (Persero) terhadap aktiva tetap yang dimilikinya yaitu dengan menggunakan metode garis lurus dengan cara perhitungan nilai perolehan dikurangi nilai residu

		(persero) cabang bandung.	kemudian dibagi dengan umur ekonomis masing-masing golongan aktiva tetap dan dihitung tetap secara konsisten dengan periode sebelumnya. Jamsostek (Persero) menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aktiva jika nilai residunya tidak berubah.
3	Gian Laksana Surya (2016)	Penerapan metode penyusutan aktiva tetap pada pt.kereta api Indonesia (persero).	Metode penyusutan aktiva tetap yang digunakan PT.kereta api Indonesia (persero) adalah metode penyusutan garis lurus dan sudah berjalan dengan baik dengan penentuan dasar tariff penyusutan, perhitungan penyusutan dan metode pencacatan penyusutannya sudah sesuai berdasarkan teori-teori yang ada dan kecelakaan kereta yang terjadi pada tahun 2012 dan 2013 berpengaruh terhadap penyusutan aktiva tetap di PT.kereta api Indonesia (persero). Hal ini dapat diketahui dari data penyusutan aktiva pada tahun 2012 bahwa terdapat beberapa aktiva tetap yang memiliki nilai minus walaupun aktiva tersebut masih memiliki umur ekonomis yang cukup <i>produktif</i> antara 9-13 tahun
4	Wanda Marcella Kunondo (2015)	Analisis pemilihan, penentuan, dan penerapan metode penyusutan aktiva tetap pada laporan keuangan PT.sederhana karya jaya ditinjau dari PSAK No.16	Pemilihan suatu metode penyusutan suatu aset merupakan masalah pertimbangan untuk menentukan kebijakan penyusutan bagi perusahaan. Dimana perusahaan harus memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan metode penyusutan yang berbeda dan perlakuan yang berbeda terhadap setiap aset perusahaan. PT.sederhana karya jaya memilih dan menerapkan metode saldo menurun ganda dengan alasan Karena metode ini mempunyai masa manfaat yang panjang, peralatan tidak muda <i>using</i> karena termasuk alat berat karena perusahaan mengeluarkan yang besar untuk pemeliharaan dan perbaikan.

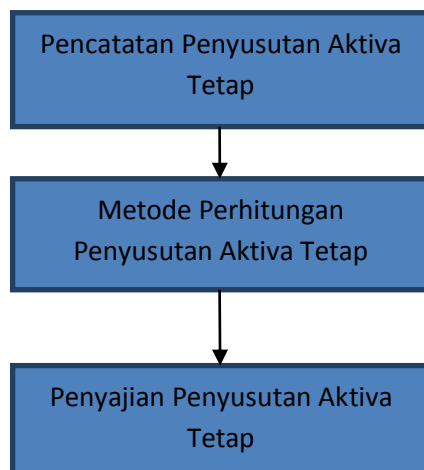
5.	Syukni Hertati Sihombing (2016)	Penerapan metode penyusutan aktiva tetap pada PD.BPR Rokan Hulu Pasir Pengaraian	Aktiva yang diakui oleh PD.BPR Rokan Hulu sebagian besar pembeliannya dimulai pada tahun 2007 dan penggunaannya diperuntukkan guna menunjang kinerja para pegawai dalam bekerja. Aktiva yang diadakan ini diperuntukkan sebagai perbaikan dalam sistem dan teknologi dalam bidang perbankan sebagai antisipasi terhadap kebutuhan pelayanan terhadap nasabah PD.BPR Rokan Hulu dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik. Penyusutan aktiva tetap terjadi karena aktiva tetap rusak akibat pemakaian, penyusutan computer pada PD. BPR Rokan Hulu adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aktiva. Metode penyusutan yang digunakan PD.BPR Rokan Hulu adalah metode garis lurus dengan menerapkan estimasi masa manfaat komputer yang dimiliki. Dengan metode garis lurus nilai penyusutan aktiva pertahunnya sama, untuk komputer masa manfaatnya 5 tahun dengan penyusutan 20% pertahunnya.
----	---------------------------------	--	--

C. Kerangka Konseptual

Aktiva adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum. Suatu pemerintahan pada dasarnya selalu berusaha untuk mencapai tujuan didirikannya pemerintahan tersebut. Untuk menunjang agar tercapainya tujuan itu, setiap

pemerintahan mempunyai aktiva (harta) tertentu guna memperlancar kegiatan yang dilaksanakan pemerintahan.

Pencatatan dan penyajian penyusutan aktiva tetap dilakukan pemerintahan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat tentang penyusutan aktiva tetap yang dimiliki pemerintah sesuai dengan PMK Nomor.1/PMK.06/2013, karena metode yang digunakan dalam pencatatan dan penyajian penyusutan aktiva tetap yaitu metode garis lurus untuk membantu Pemerintah Kota Medan dalam membuat keputusan agar tidak terjadi kesalahan pada saat menghitung penyusutan barang sehingga selalu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, demikian juga dalam hal metode perhitungan menentukan akumulasi penyusutan yang nantinya akan disajikan dalam laporan keuangan neraca pemerintah.



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah deskriptif yang dimana jenis ini adalah jenis data yang berkaitan dengan masalah penelitian yang berasal dari buku-buku, modul pemerintah serta sumber lainnya yang mendukung penelitian ini. Dalam penelitian ini terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat dan menginterpretasikan kondisi sekarang kemudian melakukan evaluasi.

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: penerapan kebijakan akuntansi terhadap penyusutan aktiva tetap adalah bahwa penyusutan adalah alokasi jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aktiva sepanjang masa manfaat yang estimasi. Jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aktiva adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tersebut dikurangi dengan estimasi nilai sisa (*salvage value*) aktiva tersebut pada akhir masa manfaatnya.

Menurut Dwi Martani, (2011:173) “Penyusutan adalah metode pengalokasian biaya aktiva tetap untuk menyusutkan nilai aktiva secara sistematis selama periode manfaat dari aktiva tersebut”.

Berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah tersusutkan dari aktiva secara sistematis selama masa manfaatnya. Metode

tersebut adalah metode garis lurus. Metode ini adalah metode yang digunakan Pemerintah Kota Medan. Metode ini menetapkan bahwa jumlah penyusutan selalu sama setiap periodik.

Rumus yang digunakan dalam metode ini adalah:

$$\text{Beban Penyusutan} = \frac{\text{Harga perolehan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Umur Ekonomis}}$$

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112 Telepon (061) 4555693 Faks (061) 4555693.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan mulai bulan Desember 2017 s/d April 2018.

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Proses Penelitian	Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra Riset	■																			
2	Pengajuan Judul	■																			
3	Penyusunan Proposal		■	■																	
4	Bimbingan Proposal			■	■	■	■														
5	Seminar Proposal							■													
6	Penyusunan dan Bimbingan Skripsi								■	■	■	■	■								
7	Sidang Meja Hijau															■					

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka yang dapat diperoleh melalui dokumen pemerintah seperti data penyusutan aktiva tetap yang terdapat pada laporan posisi keuangan. Adapun sumber data ini diperoleh berasal dari Kepala Bidang Akuntansi (BPKAD) Pada Pemerintah Kota Medan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari buku-buku acuan, karya ilmiah, jurnal, internet, dan sumber-sumber lainnya yang terkait dengan objek penelitian. Melalui perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) yang berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang disusun dalam arsip atau dokumen yang dipublikasikan seperti: laporan penyusutan aktiva tetap pemerintah kota medan pada bidang akuntansi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara peneliti untuk mengumpulkan data relevan yang nantinya akan digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini. Metode yang digunakan adalah Wawancara dan Dokumentasi.

1. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu memperoleh data langsung dari tempat penelitian yaitu Bidang Akuntansi BPKAD Kota Medan untuk mendapatkan data dan

informasi sebagai bahan utama dalam pembuatan proposal skripsi, dengan melakukan penelitian pada dokumen-dokumen dan laporan-laporan perusahaan yang berkaitan dengan penelitian.

Dokumentasi, teknik yang dilakukan dengan memanfaatkan dokumentasi tertulis pemerintahan yaitu laporan penyusutan aktiva tetap dalam format laporan posisi keuangan (neraca) yang berkaitan dengan aspek yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti bertanya langsung kepada responden untuk memperoleh informasi yang diharapkan.

Tabel 3.2
Kisi-kisi Wawancara

No.	Indikator
1.	Penyusutan Aktiva Tetap yang salah dalam pencatatan akan dikoreksi
2.	Penyajian penyusutan aktiva tetap sudah sesuai atau belum sesuai dengan PMK No.1/PMK.06/2013
3.	Pemerintah sudah menerapkan SAP atau belum sepenuhnya menerapkan SAP
4.	Terjadi kesalahan pencatatan barang yang tidak langsung dilaporkan
5.	Barang yang baru juga ikut disusutkan bukan hanya barang yang lama saja
6.	Metode perhitungan yang digunakan pemerintah dalam penyajian penyusutan aktiva tetap
7.	Terjadinya penyusutan aktiva tetap setiap tahunnya

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara-cara mengolah data yang terkumpul untuk kemudian dapat memberikan interpretasi. Hasil pengolahan data ini digunakan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu suatu metode analisis yang merumuskan dan melakukan pengumpulan, penyusunan lalu pengklasifikasian kemudian dianalisis dan diinterpretasikan secara objektif tentang data penyusutan aktiva tetap dengan

tujuan memberikan gambaran yang menyeluruh dari masalah yang dihadapi pemerintah.

Dalam hal ini ditemukanlah perbandingan teori-teori yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas untuk membuat kesimpulan dan saran yang dianggap penting. Tujuan dari penelitian deskriptif kuantitatif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena dan kemudian dianalisis dan hasil dari penelitian tersebut dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk keperluan dimasa yang akan datang. Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis yaitu:

1. Membandingkan data yang diberikan terhadap dasar teori yang digunakan, kemudian mulai membandingkan antara penyusutan aktiva tetap dengan akumulasi penyusutan yang ada pada laporan posisi keuangan (neraca) kemudian ditemukan adanya penyusutan yang terjadi setiap tahunnya.
2. Melakukan analisis untuk mengetahui penyebab terjadi penyusutan dan dilakukan tindakan/koreksi.
3. Menginterpretasikan data barang yang disusutkan dan perhitungan penyusutan setiap tahunnya sehingga memberi keterangan yang benar dan lengkap untuk pemecahan masalah yang dihadapi.
4. Menarik kesimpulan dari hasil pembahasan rumusan masalah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Pemerintah Kota Medan

Pemerintah Kota Medan beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan yang pada mulanya membuka perkampungan Medan adalah Guru Patimpus, lokasinya terletak di Tanah Deli, maka sejak zaman penjajahan orang selalu merangkaikan Medan dengan Deli (Medan Deli). Setelah zaman kemerdekaan lama kelamaan istilah Medan Deli secara berangsur-angsur lenyap sehingga akhirnya kurang populer.

Dahulu orang menamakan Tanah Deli mulai dari Sungai Ular (Deli Serdang) sampai ke Sungai Wampu di Langkat, sedangkan Kesultanan Deli yang berkuasa pada waktu itu, wilayah kekuasaannya tidak mencakup daerah diantara kedua sungai tersebut.

Secara keseluruhan jenis tanah di wilayah Deli terdiri dari tanah liat, tanah pasir, tanah campuran, tanah hitam, tanah coklat dan tanah merah. Hal ini merupakan penelitian dari Van Hissink tahun 1900 yang dilanjutkan oleh peneliti Veiens tahun 1910 bahwa disamping jenis tanah seperti yang disebutkan di atas tidak ada lagi ditemui tanah liat yang spesifik. Tanah liat inilah pada waktu

penjajahan Belanda ditempat bernama Bakaran Batu (sekarang Medan Tenggara atau Menteng) orang membakar batu bata yang berkualitas tinggi dan salah satu pabrik batu bata pada zaman ini adalah Deli Klei.

Menurut Volker pada tahun 1860 Medan masih merupakan hutan rimba dan disana-sini terutama di muara-muara sungai diselangi pemukiman-pemukiman penduduk yang berasal dari Karo dan Semenanjung Malaya. Pada tahun 1863 orang-orang Belanda mulai membuka kebun Tembakau di Deli yang sempat menjadi primadona Tanah Deli. Sejak itu perkenomian di Sumatera Utara meningkat.

Hari jadi kota Medan diperingati setiap tahun sejak tahun 1970 dan pada mulanya ditetapkan jatuh pada tanggal 1 April 1909, tetapi tanggal ini mendapat bantahan yang cukup jelas dari kalangan pers dan beberapa orang ahli sejarah. Karena itu, Walikota membentuk panitia sejarah hari jadi Kota Medan untuk melakukan penelitian dan penyidikan.

Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Walikotamadya Sjoerkani dibentuklah Panitia Hari Jadi Kota Medan. Duduk sebagai ketua adalah Prof. Mahadi, SH, Sekretaris Syahrudin Siswa, MA. Anggotanya antara lain Ny. Mariam Darus SH dan T Lukman SH.

Untuk lebih mengintensifkan kegiatan kepanitaan ini dikeluarkan lagi surat keputusan Walikotamadya kepada daerah Kotamadya Medan No. 618 tanggal 28 Oktober 1971 tentang pembentukan Panitia Penyusunan Sejarah Kota Medan dengan Ketuanya Prof. Mahadi, Sekretaris Syahrudin Siswa MA dan

anggotanya H. Mohammad Said, Dada Meuraxa, Nas Sebayang, Nasir Tim Sutannaga, M. Solly Lubis SH, Drs Payung Bangun MA dan R. Muslim Akbar.

DPRD Medan sepenuhnya mendukung kegiatan-kegiatan kepanitaan ini sehingga mereka membantuk Pansus yang diketuai MA Harahap dengan anggotanya antara lain Drs M. Hasan Ginting, Ny Djamin SH, Badar Kamil BA dan Mas Sutarjo.

Dengan berbagai persidangan dan perjalanan panjang, menetapkan bahwa perkampungan yang didirikan oleh Guru Patimpus (Nenek Moyang Datuk Hamparan Perak) tanggal 1 Juli 1590 diusulkan kepada Walikota Medan untuk dijadikan sebagai hari jadi Kota Medan dalam bentuk perkampungan yang kemudian dibawa ke sidang DPRD tingkat II Medan untuk disahkan. Berdasarkan sidang DPRD tanggal 10 Januari 1973 ditetapkan bahwa usul tersebut dapat disempurnakan.

Sesuai dengan hal tersebut, Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Medan mengeluarkan Surat Keputusan No. 74 tanggal 14 Pebruari 1973 agar Panitia Penyusunan Sejarah Kota Medan melanjutkan kegiatannya untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna. Berdasarkan perumusan yang dilakukan oleh Pansus Hari Jadi Kota Medan yang diketuai MA. Harapan bulan Maret 1975 bahwa tanggal 1 Juli 1590 merupakan hari jadi Kota Medan dan sebagai landasannya adalah didirikannya Si Sepuluh Dua Kuta di Areal Medan.

Selanjutnya Dewa Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Medan menetapkan tanggal 1 Juli 1590 sebagai Hari Jadi Kota Medan dan mencabut Hari

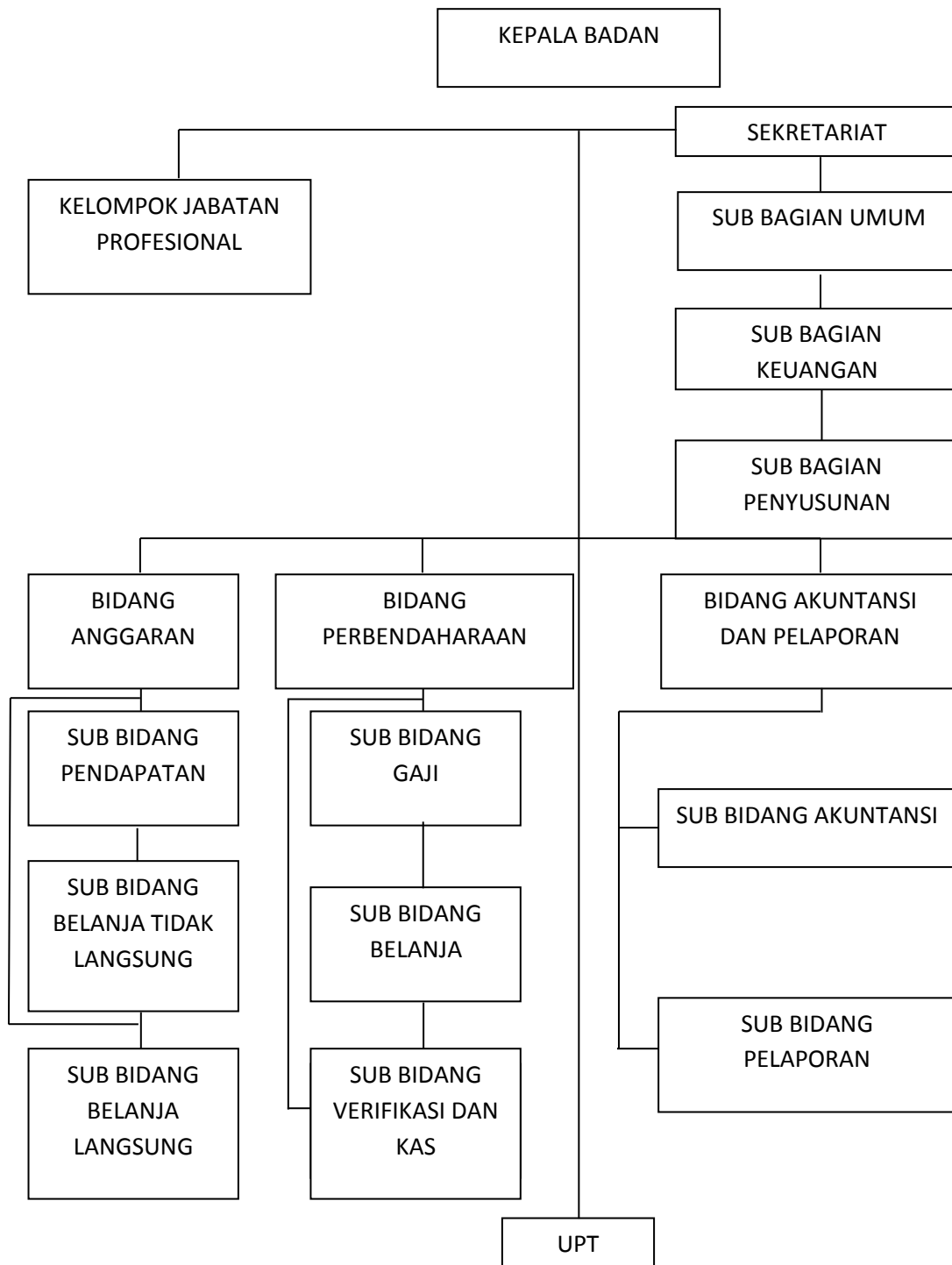
Ulang Tahun Kota Medan yang diperingati setiap tanggal 1 April pada waktu-waktu sebelumnya.

2. Visi dan Misi

Visi adalah cara pandang jauh ke depan, kemana instansi pemerinah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Secara umum visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan. Penetapan visi mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategis yang jelas, berorientasi terhadap masa depan dan selanjutnya diharapkan mampu menumbuhkan komitmen di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan.

Upaya untuk mewujudkan keberhasilan visi ini tentunya sangat ditentukan oleh kinerja dan peran aparatur Pemerintahan Kota Medan. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan berkeinginan agar setiap aparatur Pemerinah Daerah Kota Medan berkemampuan melaksanakan tugasnys dengan baik, berdaya guna dan berhasil guna didukung dengan Kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif dan efisien sehingga dapat diwujudkan pelayanan Pemerintah Kota Medan yang prima sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan serta standar operasional dan prosedur (SOP). Sejalan dengan visi dan misi Kota Medan, maka visi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan Tahun 2015-2017 adalah sebagai berikut Terwujudnya Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Medan Yang Profesional, Berwawasan Manajemen, Pengelolaan Keuangan Yang Sistematis, Efisien dan Efektif.

3. Struktur Organisasi



Gambar 4.1
Struktur Organisasi BPKAD
Sumber: Kantor Walikota Medan (2016)

4. Analisis Data

1. Jenis Aktiva

- Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
- Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- Tanah yang dikelompokkan sebagai aktiva tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

2. Metode yang digunakan untuk menghitung penyusutan

Metode yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Untuk itu perlu diketahui apakah metode penyusutan yang telah diterapkan oleh pemerintah telah memperhatikan perubahan nilai aktiva tetap yang menurun yang disebabkan karena berlalunya waktu atau menurunnya manfaat yang diberikan aktiva tersebut.

3. Penyajian penyusutan aktiva tetap

Menyajikan nilai aktiva tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aktiva dalam laporan keuangan pemerintah. Untuk penyajian laporan keuangan neraca penentuan nilai yang dapat disusutkan tersebut diberlakukan untuk setiap unit aktiva tanpa nilai residu. Di neraca akumulasi penyusutan tersebut disajikan sebagai pengurang nilai aktiva tetap.

Penyusutan nilai barang yang ada pada daftar perhitungan penyusutan aktiva tetap dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Penyusutan Aktiva Tetap Pemerintah Kota Medan

Tahun	Jumlah
2012	Rp. 93.240.455
2013	Rp. 712.242.803
2014	Rp. 826.605.103
2015	Rp. 2.146.318.549
2016	Rp. 2.963.465.591

Dari data diatas, dapat diketahui adanya kenaikan nilai barang yang disusutkan setiap tahunnya dimana pada tahun 2012-2013 sebesar Rp. 619.002.348,- pada tahun 2013-2014 sebesar Rp. 114.362.300,- pada tahun 2014-2015 sebesar Rp. 1.319.713.446,- pada tahun 2015-2016 sebesar Rp. 817.147.042,- yang artinya bertambahnya barang yang disusutkan oleh pemerintah setiap tahunnya yaitu sebesar Rp. 2.870.225.136,- pada lima tahun terakhir terhitung dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah akan mengeluarkan biaya yang lebih besar.

Dimana data yang diperoleh dari daftar perhitungan penyusutan aktiva tetap mengalami kenaika dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Sedangkan pada laporan neraca nilai akumulasi penyusutan aktiva tetap pada tahun 2013 dan 2015 nilainya tidak sesuai dengan daftar perhitungan penyusutan aktiva tetap, pada tahun 2013 pada daftar perhitungan penyusutan nilainya Rp. 712.242.803 sedangkan pada laporan neraca nilainya Rp. 402.552.630. Adanya penambahan penyusutan barang pada tahun 2013 sebesar Rp. 309.690.173,- tetapi tidak dicatat dan dilaporkan dalam penyajian laporan keuangan neraca. Pada tahun 2015 juga

terjadi kesalahan pada pencatatan laporan keuangan neraca. Dimana penyusutan barang yang ada pada daftar perhitungan penyusutan nilainya Rp. 2.146.318.549 sedangkan pada laporan neraca nilainya Rp. 2.287.035.438. Adanya kesalahan pada pencatatan dan penyajian barang pada tahun 2015 sebesar Rp. 140.716.889,- sehingga harus dilakukan koreksi terlebih dahulu sesuai dengan PMK No.1/PMK 06/2013 sebelum menyajikannya pada laporan keuangan neraca, agar tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan dan penyajian.

Untuk penyajian laporan keuangan neraca penentuan nilai yang dapat disusutkan tersebut diberlakukan untuk setiap unit aktiva tanpa nilai residu. Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku semesteran dan tahunan, kecuali untuk penyusutan pertama kali, didasarkan pada nilai buku akhir tahun pembukuan sebelum diberlakukannya penyusutan aktiva tetap. Penyusutan tersebut diakumulasikan setiap semester dan dicatat dalam akun Akumulasi Penyusutan. Di Neraca, Akumulasi Penyusutan tersebut disajikan sebagai pengurang nilai aset tetap dan pengurang dari nilai pos Diinvestasikan Dalam Aktiva Tetap. Pencatatan penyusutan aset tetap dalam neraca dilakukan sejak perolehan sampai dengan aset tetap tersebut dihapuskan.

B. Pembahasan

Perhitungan penyusutan aktiva tetap yang dilaporkan dalam laporan keuangan sebesar nilainya dan posisi di neraca disajikan dalam akumulasi penyusutan aktiva tetap.

1. Pencatatan Penyusutan Aktiva Tetap

Penilaian penyusutan aktiva tetap pada Pemerintah Kota Medan berdasarkan nilai perolehannya yang pertama kali merupakan nilai buku sampai dengan nilai perolehan 31 Desember, nilai buku yang merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan yang sebelumnya dilaporkan sebagai barang yang baru dibeli yang harus langsung dilaporkan. Namun pada barang yang tidak masuk dalam daftar perhitungan penyusutan yang seharusnya pemerintah harus langsung melaporkan barang yang baru dibeli agar dapat dihitung nilainya, tetapi pemerintah belum sepenuhnya menerapkan hal tersebut terlihat dari akumulasi penyusutan yang mengalami kenaikan nilai tetapi tidak dilakukannya koreksi dan hal ini belum sepenuhnya menerapkan PMK Nomor 1/PMK 06/2013.

Prosedur pencatatan yang dilakukan saat terjadinya perolehan aktiva tetap dicatat sebesar harga perolehannya. Dalam perolehan aktiva tetap secara tunai, harga perolehan aktiva tetap terdiri dari harga beli aktiva ditambah dengan biaya yang harus dikeluarkan, sampai aktiva tetap tersebut siap untuk digunakan dalam operasional perusahaan. Sesuai dengan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa Koperasi Prima Polipera dalam menentukan harga perolehan aktiva tetap hanya berdasarkan harga karena sampai saat ini untuk pembelian aktiva tetap Koperasi Prima Polipera tidak ada biaya-biaya tambahan yang dikeluarkan oleh

Koperasi Prima Polipera terkait dengan pembelian aktiva tetap tersebut. Biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam memperoleh aktiva tetap diantaranya: biaya angkut dan biaya perbaikan. <https://media.neliti.com/.../109845-ID-analisis-penerapan-krbijakan-akuntansi-pdf>

2. Metode Penyusutan Aktiva Tetap

Pencatatan Penyusutan Aktiva Tetap Pemerintah Kota Medan yang beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 ini menggunakan metode garis lurus yang dimana sudah ditetapkan dalam peraturan menteri keuangan untuk menghitung penyusutan aktiva tetap yang mereka miliki, karena pemerintah memiliki barang yang cukup banyak dan jenis jenisnya juga berbeda-beda, maka pemerintah menyajikan nilai aktiva tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi dengan memperkirakan sisa masa manfaat yang masih diharapkan dapat diperoleh beberapa tahun ke depan. Dalam hal menghitung penyusutan dengan metode garis lurus Pemerintah Kota Medan telah sesuai dengan PMK Nomor 1/PMK 06/2013 yang dimana metode penyusutan dengan menggunakan garis lurus dapat mempermudah pihak terkait dalam menghitung penyusutan aktiva tetap pemerintah.

Metode Penyusutan yang digunakan BPJS menggunakan metode garis lurus yang digunakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aktiva jika nilai residunya tidak berubah sesuai dengan ketetapan perhitungan pada nilai residu.

<https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/monex/article/download/260/254>

oleh D Mufdiarto - 2015

3. Penyajian Penyusutan Aktiva Tetap

Penyusutan dicantumkan dineraca dalam akun akumulasi penyusutan yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan dineraca, dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya. Penyusutan aktiva tetap pada laporan posisi keuangan pemerintah menunjukkan nilai sebesar Rp. 93.240.455 pada tahun 2012, sebesar Rp. 402.552.630 pada tahun 2013, sebesar Rp. 826.277.105 pada tahun 2014, sebesar Rp. 2.287.035.438 pada tahun 2015, sebesar Rp. 2.963.465.591 pada tahun 2016. Dalam jumlah akumulasi penyusutan pada aktiva tetap setiap tahunnya mengalami kesalahan pada saat pencatatan yang dimana terdapat sedikit kelemahan dalam penyajiannya pada tahun 2013 dan 2015 dimana nilai akumulasi penyusutannya bertambah di neraca karena adanya perbaikan atau renovasi yang tidak dicatat dan dihitung pada daftar perhitungan penyusutan aktiva tetap. Penyusutan aktiva tetap yang mengalami kenaikan nilai pada daftar perhitungan penyusutan aktiva tetap yang diletakkan pada laporan posisi keuangan sebagai akumulasi penyusutan yang seharusnya mengalami kenaikan tersebut dikoreksi (d disesuaikan) nilainya berdasarkan nilai pada daftar perhitungan penyusutan.

Dalam hal penyajian Pemerintah Kota Medan belum sepenuhnya menerapkan PMK Nomor 1/PMK 06/2013 yang dimana setiap penyusutan yang mengalami kenaikan nilai harus dikoreksi (d disesuaikan) berdasarkan nilai perolehannya, seperti yang dijelaskan pada PMK Nomor 1/PMK 06/2013 nilai yang dapat disusutkan pasal 11 ayat 01 dalam hal terjadi perubahan nilai aktiva tetap sebagai akibat koreksi nilai Aktiva Tetap yang disebabkan oleh kesalahan

dalam pencantuman nilai yang diketahui dikemudian hari, maka dilakukan koreksi atau penyesuaian pada penyusutan aktiva tetap tersebut. Masa manfaat Aktiva Tetap pada pasal 13 ayat 3 dalam hal terjadinya perbaikan Aktiva Tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat dan terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat yang diketahui di kemudian hari. Pasal 28 (b) dalam hal ini koreksi penyusutan aktiva tetap diperhitungkan sebagai penambah nilai akun Akumulasi Penyusutan.

hanin.web.id/.../PMK-01-PMK.06-2013-tentang-Penyusutan-BMN-Berupa-Aset-Tetap.

Dampak dari tidak dilakukannya koreksi (penyesuaian) oleh Pemerintah Kota Medan tentang kenaikan nilai di neraca, maka pemerintah seharusnya menyesuaikan nilai penyusutan yang ada pada daftar perhitungan penyusutan agar sesuai dengan yang ada pada laporan keuangan neraca.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode perhitungan penyusutan dengan menggunakan garis lurus yang dapat memudahkan untuk setiap saat dapat mengetahui nilai suatu penyusutan secara keseluruhan untuk dapat mengantisipasi terjadinya kenaikan penyusutan dan kesalahan dalam perhitungan dalam hal ini telah sesuai dengan PMK Nomor 1/PMK 06/2013.
2. Penyajian penyusutan dalam laporan keuangan telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Medan yang bertujuan untuk memberi informasi mengenai jumlah penyusutan dan hal ini telah sesuai dengan PMK Nomor 1/PMK 06/2013, akan tetapi pada pencatatan dan penyajian tidak dilakukan koreksi oleh Pemerintah Kota Medan yang mengakibatkan pemerintah menyajikan nilai penyusutan yang tinggi dan hal ini belum sesuai dengan PMK Nomor 1/PMK 06/2013.
3. Pencatatan yang dilakukan saat terjadinya perolehan aktiva tetap dicatat sebesar harga perolehannya. Dalam perolehan aktiva tetap secara tunai, harga perolehan aktiva tetap terdiri dari harga beli aktiva ditambah dengan biaya yang harus dikeluarkan, sampai aktiva tetap tersebut siap untuk digunakan dalam operasional pemerintah.

B. Saran

Atas dasar kesimpulan di atas maka peneliti menyampaikan beberapa saran, sebagai berikut :

1. Metode yang digunakan dalam menghitung garis lurus telah sesuai dengan PMK Nomor 1/PMK 06/2013 agar lebih dapat memudahkan dalam memperoleh nilai penyusutan aktiva tetap pemerintah agar dapat mempertahankan kualitas aktiva tetap dan dapat lebih bermanfaat untuk pemerintah.
2. Pemerintah Kota Medan sebaiknya lebih teliti dalam mencatat nilai barang pada saat diperoleh agar tidak terjadi kenaikan nilai perolehan pada penyusutan aktiva tetap. Pemerintah Kota Medan juga sebaiknya harus langsung melaporkan barang yang baru dibeli dan mencatat dalam pembukuan penyusutan untuk menghindari kesalahan dalam penyajian penyusutan aktiva tetap.
3. Pemerintah Kota Medan sebaiknya melakukan koreksi (penyesuaian) pada akumulasi penyusutan aktiva tetap yang dimiliki pemerintah yang mengalami kesalahan pada saat pencatatan agar penyajiannya pada laporan keuangan di neraca tidak mengalami kenaikan nilai. Agar penyajian penyusutan aktiva tetap pemerintah sesuai dengan PMK Nomor 1/PMK 06/2013.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia Diana & Lilis Setiawati. Akuntansi Keuangan Menengah. Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Terbaru (2017). Yogyakarta.
- Arfan Ikhsan, Sukma Lesmana, Atma Hayat. Teori Akuntansi. Cetakan Pertama (2015). Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Citapustaka Media. Medan.
- Dwi Martani (2011) Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).
- Eka Nurmala Sari, Heny Triastuti Kurnia Ningsih, Yuswar Effendy. Akuntansi Sektor Publik. Cetakan Pertama (2015). Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Perdana Publishing. Medan.
- Ely Suhayati & Sri Dewi (2009) Akuntansi Keuangan. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Firdaus (2010), Pengantar Akuntansi, Edisi Kedua, Yogyakarta : FEUI.
- Gian Laksana Surya (2016), Penerapan metode penyusutan aktiva tetap pada pt. kereta api Indonesia (persero). Jurnal.
- Idris Somad (2016), Analisis Penerapan Kebijakan Akuntansi Aktiva tetap pada koperasi prima polipera, Rokan Hulu, Jurnal.
- K.Fred Skousen (2009), Akuntansi Keuangan, Buku Satu, Salemba Empat.
- Munawir (2010) Analisa Laporan Keuangan, Edisi Keempat, Liberty, Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor.1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aktiva Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Salemba Empat.
- Sinambela Elizar, Sri Rahayu, Saragih Fitriani, Fahrur A, (2010), Akuntansi Keuangan Dasar Ikhtisar Teori, Uniba Press: Medan.
- Slamet Sugiri, (2009) Akuntansi Suatu Pengantar 2. Edisi Kelima. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Syukni Hertati Sihombing (2016), Penerapan Metode Penyusutan Aktiva Tetap pada PD.BPR, Rokan Hulu Pasir Pengaraian, Jurnal.

Wanda Marcella Kunondo (2015), Analisis pemilihan, penentuan, dan penerapan metode penyusutan aktiva tetap pada laporan keuangan PT. Sederhana Karya Jaya ditinjau dari PSAK No. 16, Manado, Jurnal.

Warren, Reeve, Fess (2008), Pengantar Akuntansi, Buku Satu, Edisi 21, Jakarta: Salemba Empat.

Wiwin Krisnawati (2013), Tinjauan atas perolehan dan penyusutan aktiva tetap pada pt.jamsostek (persero) cabang bandung, Jurnal.

hanin.web.id/.../PMK-01-PMK.06-2013-tentang-Penyusutan-BMN-Berupa-Aset-Tetap.

<https://media.neliti.com/.../109845-ID-analisis-penerapan-krbijakan-akuntansi-pdf>

<https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/monex/article/download/260/254> oleh D Mufdiarto - 2015